

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk melakukan tinjauan pelaksanaan penghapusan barang milik negara karena sebab-sebab lain (hilang) di KPKNL Pematangsiantar, dengan fokus pada tiga hal yaitu tinjauan pelaksanaan penghapusan kendaraan dinas karena hilang dengan peraturan yang berlaku, permasalahan dalam penghapusan barang milik negara, dan solusi terkait permasalahan tersebut. Sebagai metode penelitian, penulis melakukan metode kepustakaan dan metode studi lapangan dengan melakukan wawancara kepada seksi pengelolaan kekayaan negara. Hasil penelitian menunjukkan tiga poin yaitu yang pertama, secara umum pelaksanaan penghapusan barang milik negara berupa kendaraan dinas karena sebab-sebab lain (hilang) pada KPKNL Pematangsiantar sudah sesuai dengan PMK Nomor 83/PMK.06/2016 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pemusnahan dan Penghapusan Barang Milik Negara, yang kedua, dalam praktik pelaksanaan penghapusan kendaraan dinas karena hilang pada KPKNL Pematangsiantar ditemui beberapa masalah yaitu penyelesaian tuntutan ganti rugi yang masih sering diabaikan oleh satker, birokrasi yang rumit karena pelimpahan kewenangan yang masih panjang dalam proses penghapusan BMN, dan lain-lain, yang ketiga, untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi tersebut maka KPKNL Pematangsiantar menetapkan kebijakan untuk mengantisipasi kejadian yang sama dikemudian hari.

Kata kunci : Barang milik negara, kendaraan dinas, penghapusan, hilang

Abstract

This study aimed to conduct a review of the implementation of the deletion of state property due to other reasons (loss) in KPKNL Pematangsiantar, focusing on three things, namely a review of the implementation of the deletion of official vehicles due to loss with applicable regulations, problems in the deletion of state property, and solutions related to this problem. As a research method, the author uses the library method and the field study method. The results indicated three points, (1) in general the implementation of the deletion of state property in the form of official vehicles due to other reasons (missing) in KPKNL Pematangsiantar is in accordance with PMK Number 83/PMK.06/2016 concerning Procedures for the Destruction and Elimination of Goods State-owned, (2) in the practice of implementing the deletion of official vehicles because they were lost, several problems were encountered, namely the settlement of compensation claims which are still often ignored by the stakeholders, complicated bureaucracy due to the long delegation of authority in the process of deletion of Goods State-owned, and others, (3) to overcome the problems faced, KPKNL Pematangsiantar set a policy to anticipate similar incidents in the future.

Keywords : Goods State-owned, official vehicle, deletion, loss